



Kementerian Keuangan Selenggarakan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017

Jakarta, 14 September 2017 - Hari ini, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 dengan tema "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Negara untuk Indonesia Sejahtera" di Istana Negara. Rakernas dibuka oleh Presiden RI dan dihadiri oleh para Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretaris Jenderal, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, dan Pimpinan institusi terkait.

Penyelenggaraan Rakernas ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati, Walikota untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara; membangun kesadaran bahwa tujuan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel adalah mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan; meningkatkan pemanfaatan informasi yang tersaji pada laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan manfaat bagi masyarakat; memastikan sinergi penerapan akuntansi berbasis akrual dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; serta memberikan apresiasi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Setiap rupiah yang dialokasikan di dalam APBN dan APBD merupakan amanat dari rakyat yang harus dikelola oleh pemerintah secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada manfaat bagi masyarakat. Untuk itu, pengelolaan keuangan negara dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat. Selain itu, diharapkan agar seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga serta para Gubernur, Bupati, dan Walikota beserta jajarannya untuk bersungguh-sungguh :

1. Merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi strategi pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada manfaat.
2. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam mengawal setiap tahapan pengelolaan keuangan negara.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan APBN/APBD.

Terkait dengan tema Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa tema tersebut dipilih dengan memperhatikan arahan Bapak Presiden RI pada Rakernas Akuntansi tahun yang lalu, bahwa pencapaian opini WTP harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 memperoleh opini terbaik yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang pertama kalinya sejak pemerintah membuat laporan keuangan. Selain capaian yang

membanggakan atas LKPP Tahun 2016 tersebut, juga terdapat peningkatan jumlah entitas yang mencapai opini WTP. Pada 2016, jumlah Kementerian/Lembaga yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP meningkat menjadi 73 Kementerian/Lembaga, dimana sebelumnya di 2015 sebanyak 56 Kementerian/Lembaga. Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara pada 2016 juga memperoleh opini WTP yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP di 2016 meningkat menjadi 375 Pemerintah Daerah, dimana sebelumnya pada 2015 sebanyak 312 Pemerintah Daerah. Opini WTP itu sendiri memiliki makna yang mendalam, tidak hanya bagi Pemerintah selaku pengelola Keuangan Negara, namun juga bagi perekonomian nasional dan masyarakat.

Pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tahun 2017, Pemerintah memberikan penghargaan bagi Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten) yang telah mendapat opini terbaik dari BPK yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian minimal selama 5 (lima) kali berturut-turut.

Pemerintah mengharapkan kegiatan Rakernas ini dapat membangun semangat bersama untuk terus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, sehingga APBN dan APBD dapat digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam melaksanakan program-program pembangunan nasional untuk mewujudkan Nawacita sebagai upaya dalam mencapai Indonesia Sejahtera. Pada akhirnya, pengelola keuangan negara yang lebih baik menjadi tanggung jawab bersama untuk mencapai tujuan bernegara.

Informasi lebih lanjut:

Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Kementerian Keuangan
Gd. Prijadi Praptosuhardjo III, Jl Budi Utomo
Nomor 6 Jakarta 10710
Telp. 021 –3449230, Fax. 021 – 384776

